



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Juli 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga Bulan Juni Tahun 2020)
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 14 (empat belas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 19 (sembilan belas) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 47 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), hari Senin, 13 Juli 2020, dibuka pukul 13.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Menteri Dalam Negeri memaparkan mengenai evaluasi kinerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Tahun 2019 meningkat sebesar Rp.232.626 Milyar atau 7,26%.

2. Jika dibandingkan dengan Pagu DIPA Tahun 2018 sebesar Rp.3.251,21 Trilyun, mengalami kenaikan sebesar Rp.154,38 Milyar atau 4,67%.
3. Realisasi TA.2019 mencapai 96,81% atau meningkat 2,22 dari Realisasi *Audited* TA.2018 sebesar 94,59%.
4. Mensinergikan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah untuk memastikan efektifitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, melalui pelaksanaan Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Kortek Renbang), penerbitan Permendagri No.40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021, dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2021 secara virtual.
5. Dukungan Sukses Pilkada Tahun 2020:
 - Penyelenggaraan koordinasi Bidang Polpum dan Deteksi dini;
 - Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) Pemilih Pemula Kepada KPU-RI sebagai data tambahan pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 (total DP4 yang telah diserahkan sebesar 105.852.716 Jiwa);
 - Terbitnya PERPU No. 2 Tahun 2020 (terkait Penundaan Pilkada Serentak bulan Desember 2020) karena bencana non alam COVID-19; dan
 - Diterbitkannya Permendagri No.41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No.54 Tahun 2019 (mengatur tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD).
6. Mendukung Gugus Tugas Nasional dalam percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
7. Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 melalui konsolidasi dalam rapat kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di 33 Provinsi dengan jumlah peserta 30.303 Orang.
8. Surat Keterangan (Suket) dan Print Ready Record (PRR) yang selama ini tidak bisa dicetak menjadi KTP-el saat ini sudah dapat dituntaskan dengan tersedianya 41 Juta keping Blangko KTP-el.
9. Perekaman KTP-el saat ini telah mencapai 99% dari penduduk wajib KTP-el, sedangkan 1% sisanya sebagian besar berada di Indonesia Timur khususnya di Papua dan Papua Barat.
10. Pelaksanaan Pemanfaatan Data melalui Penandatanganan PKS dengan Lembaga Pengguna sebanyak 2.108 Lembaga.
11. Telah tercapai kesepakatan Rencana Aksi penanganan banjir dan longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024 oleh 6 K/L, 3 Provinsi, 4 Kabupaten, dan 5 Kota.

12. Pemenuhan pelayanan dasar Trantibumlinmas bagi masyarakat melalui Penguatan kualitas dan kapasitas Aparatur Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran.
13. Sosialisasi dan pembumih nilai-nilai Pancasila melalui Kegiatan Talk Show dengan tema “Nasional Is Me Kemendagri Goes To Campus”.
14. Mendorong daerah dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 dengan Pembinaan Penerapan Inovasi Daerah melalui Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 .
15. Peningkatan Reformasi Birokrasi di Kemendagri dengan nilai sebesar 75,43 (dari tahun sebelumnya sebesar 75,02) dan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 73,30 (dari tahun sebelumnya sebesar 73,09).
16. Penanganan perkara pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebanyak 116 putusan perkara.
17. Penandatanganan Kesepakatan Bersama 6 Menteri/Kepala Lembaga, 3 Provinsi, 5 Kota, dan 4 Kabupaten dalam rangka Penanganan Banjir di wilayah Jabodetabek-Punjur 2020-2024.
18. Kemendagri Kembali mendapatkan Penghargaan atas Laporan Keuangan dengan Capaian Opini WTP 6 tahun berturut-turut.

Berikut disampaikan capaian kerja BNPP Tahun Anggaran 2019, yaitu:

1. Terlaksananya Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Tahun 2019 Di Kab. Morotai, mendorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara secara komprehensif dan terpadu/terintegrasi, melalui kegiatan lintas Kementerian/Lembaga di daerah perbatasan
2. Terlaksananya Rakor Pengendalian Perbatasan mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan dan permasalahan di Perbatasan Negara Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
3. Terlaksananya Rakor Camat Perbatasan memberikan pemahaman dan pengetahuan, arah kebijakan pemerintah indonesia maju 2020-2024; tugas penyelenggaraan urusan pemerintah umum; tugas camat dalam membantu pengawasan bidang *Customs, Immigration, Quarantine (CIQ)*
4. Terlaksananya Rakor Pembangunan Perbatasan guna mengoptimalkan peningkatan efektivitas sekaligus melaksanakan percepatan Pembangunan Perbatasan Negara secara terpadu
5. Peningkatan Kapasitas Wirausaha Pemula Perbatasan Negara Sebanyak 223 orang di 11 Provinsi (Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kaltara, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
6. MoU penyelesaian 2 (dua) segmen OBP di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen C500 – C600. Pada Persidangan ke 43 *The Joint Indonesia – Malaysia (JIM) Boundary Committee on Survey and Demarcation of International Boundary*.

7. Fasilitasi/Koordinasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Kementerian KKP di Morotai dan Talaud.
8. Fasilitasi/Koordinasi peningkatan produksi padi melalui Cetak Sawah 800 Hektar di Merauke oleh Kementerian Pertanian
9. Fasilitas/Koordinasi pengadaan 10 jaringan trayek penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) di Kawasan Perbatasan
10. Fasilitasi/Koordinasi program Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dengan kementerian BPN/ATR, terdiri dari 14 Rancangan Peraturan RDTR Kawasan Perbatasan Negara 1 RTR KPN Provinsi Riau dan Kepri
11. Fasilitasi/Koordinasi program peningkatan Sarpras Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Perumahan, Pasar Tradisional Pemerintahan dan Konektivitas dan Jaringan Listrik dan Jalan pada 187 Kecamatan Lokasi Prioritas dan 10 PKSN oleh K/L Anggota BNPP
12. Koordinasi pembangunan sarana dan prasarana dasar dengan Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbud, dan perdagangan.
13. Koordinasi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dengan Kemendagri dan bantuan sosial dengan kementerian social,
14. Koordinasi pembangunan infrastruktur konektivitas dengan Kemenhub, Kominfo, dan ESDM koordinasi pembangunan jalan sejajar perbatasan Kalimantan s/d 2019 dengan Kemenpu-RU.
15. Koordinasi pembangunan jalan sejajar perbatasan papua s/d 2019 dengan Kemenpu-PR
16. Koordinasi pembangunan jalan sejajar perbatasan ntt s/d 2019 dengan kemenpu-pr

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2019, dan mendorong Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang sehingga lebih produktif dan efektif dengan berpedoman kepada kinerja berbasis anggaran.
2. Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi, Komisi II DPR RI mendukung kebijakan Kemendagri dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) di setiap tingkatan pemerintahan.
3. Terkait dengan kasus dugaan penjualan Pulau Malamber, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Komisi II DPR RI mendesak kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera berkoordinasi secara langsung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi II DPR RI, dan instansi terkait lainnya.

4. Komisi II DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk lebih meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Antar Negara serta koordinasi yang optimal dengan berbagai instansi terkait untuk menangani dan mencegah permasalahan *transnational crime*, berupa perdagangan orang (*human trafficking*), peredaran gelap narkoba, IUU *fishing*, dan lain-lain.
5. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020, Komisi II DPR RI mendesak Kemendagri untuk memastikan semaksimal mungkin pemenuhan KTP-el bagi pemilih di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020.
6. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk segera mengkoordinasikan penuntasan pencairan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahap II paling sedikit 60% sudah harus dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.
7. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan tegas dan efektif sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Komisi II DPR RI bersama Kemendagri akan melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pembinaan sesuai dengan tujuan pembentukan IPDN.
9. Komisi II DPR RI mendukung langkah Kemendagri yang akan menerbitkan surat edaran ke seluruh jajaran Dukcapil di semua tingkatan dan lebih proaktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait data KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 13 Juli 2020

KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si.

A-367